

Persepsi Masyarakat tentang Konflik dan Perdamaian di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Oleh
PIETER SAMMY SOSELISA⁶

Abstraksi

Studi ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat tentang konflik dan perdamaian serta memberikan stimulasi dan motivasi partisipasi publik yang aktif dan produktif dalam proses pembangunan yang turut dalam pengelolaan perdamaian melalui pembangunan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan selalu melahirkan perubahan-perubahan baik yang terkait dengan nilai, mekanisme dan sistem yang belum sepenuhnya mampu diadaptasi oleh masyarakat terutama pada masyarakat lokal. Kondisi ini potensial menimbulkan konflik di dalam masyarakat, oleh karena itu perlu dicermati dalam rangka memelihara dan memfasilitasi dinamika pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. Orientasi pengelolaan perdamaian melalui pembangunan masyarakat ini memiliki makna yang sangat penting dan bernilai strategis, karena masyarakat yang akan terlibat dan merasakan hasil pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus diberi peran, sehingga mereka merasa ikut dilibatkan secara aktif dalam arena pembangunan. Keterlibatan masyarakat penting dalam rangka mendukung perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban yang dinamis, untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit berupa kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik dan dapat memberikan jaminan bagi langgengnya kondisi yang aman, stabil dan damai secara berkelanjutan.

Kata kunci : konflik, pengelolaan perdamaian

A. Pendahuluan

Implementasi pembangunan di berbagai negara terutama negara-negara berkembang, umumnya masih menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan semata. Realitas ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat di kebanyakan negara berkembang yang masih hidup dalam kemiskinan, sehingga dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk menolong dirinya jika tidak diberi bantuan khusus oleh para agen pembangunan yang dalam hal ini adalah pemerintah. Kondisi pembangunan ekonomi yang modern seringkali dipandang sebagai jawaban, yang mengakibatkan implikasi terhadap posisi dan peran masyarakat di dalam proses pembangunan. Masyarakat hanya diberikan peran yang sangat kecil dan terbatas. Kenyataan ini mendapat tanggapan kritis terutama dari kalangan ilmuwan sosial, karena pandangan tersebut dianggap membatasi kekuatan dan kreativitas lokal, serta menyebabkan masyarakat menjadi terasing dengan lingkungannya (van Ufford dan Giri, 2004).

⁶ Pieter Sammy Soselisa – Dosen Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Pattimura, Ambon

Marjinalisasi peran masyarakat dalam pembangunan terutama akibat paradigma yang dianut oleh para aktor pembangunan, sering diikuti pula dengan replikasi model pembangunan ke dalam tatanan masyarakat di negara-negara berkembang; sementara di lain pihak, masyarakat tidak cukup akrab dengan model atau mekanisme dimaksud, sehingga, jika replikasi tersebut dilakukan, maka masyarakat akan kehilangan apa yang disebutnya sebagai *symbolic engine* yang merupakan aset kultural atau modal sosial yang mencerminkan potensi kekuatan suatu masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan dirinya atas dasar orientasi nilai-nilai lokal.

Kenyataan ini cenderung menimbulkan konflik akibat masyarakat merasa kurang berperan dalam arena pembangunan, bahkan merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak mungkin menghapus konflik dari dunia ini (Nugroho, Dirdjosanjoto, dan Kana, 2004). Konflik merupakan sebuah realitas yang selalu mengiringi langkah hidup manusia dan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif (komunal). Dalam setiap konflik terdapat kontradiksi, sesuatu menghalangi sesuatu yang lain, dengan kata lain terdapat suatu masalah (Galtung, 2003). Banyak faktor pencetus terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat khusus pada negara yang sedang berkembang yang terutama adalah masalah kemiskinan, masalah diskriminasi (kesenjangan sosial) dan pemerataan pembangunan, masalah politik dan kehidupan berdemokrasi serta pemicu konflik lainnya. Penyebab konflik dapat bermacam-macam bahkan konflik bisa berawal dari permasalahan sepele yang dimulai dari konflik antar individu kemudian melibatkan kelompok berdasarkan suku, agama, ras, bahasa, keyakinan politik, dan terus melebar hingga melibatkan masyarakat dalam jumlah yang lebih besar, bahkan mereka yang tidak ada sangkut pautnya dengan konflik tersebut pada akhirnya terkena imbas atau bahkan terlibat atau ikut melibatkan diri di dalamnya.

Dalam kehidupan kendati konflik agak sulit dihilangkan, tetapi yang mungkin adalah mengelola konflik dengan mentransformasikan para pelaku konflik menjadi agen perdamaian dan agen pembangunan.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang sering terjadi konflik, selain konflik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang pernah terjadi, juga sering terjadi konflik agraria tentang tapal batas, konflik menyangkut sumber daya alam dan pengelolaannya, dan lain sebagainya. Konflik tersebut membawa dampak yang cukup besar karena terkait dengan berbagai kerugian baik secara material maupun non material dan dampak tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik sosial di awal era reformasi yang diawali tahun 1998, pemerintah tampak belum terlalu berhasil memotivasi dan merangsang partisipasi masyarakat yang aktif dan produktif dalam proses pembangunan melainkan justru sebaliknya, melahirkan perubahan-perubahan mendasar baik yang terkait dengan nilai/norma, mekanisme dan sistem yang belum sepenuhnya mampu diadaptasi oleh masyarakat. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat, sehingga dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi perlu dicermati dalam rangka memelihara dan memfasilitasi dinamika pembangunan yang stabil dan berkesinambungan.

Saat ini kondisi Provinsi Maluku secara keseluruhan, telah berkembang semakin kondusif yang tentunya mempunyai dampak positif bagi implementasi berbagai program

pembangunan terutama dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi. pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan perdamaian melalui pembangunan masyarakat memiliki arti yang sangat penting dan bernilai strategis. Dan ini tentu juga berimbas pada upaya-upaya pemulihan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan maka kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu diupayakan sebagai instrumen agar mampu mendorong proses pembangunan perdamaian, disamping mempertimbangkan secara serius pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian pembangunan daerah, sejak perencanaan hingga implementasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan pembangunan sangat penting, karena selain persoalan yang telah dihadapi selama ini juga akibat kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak destruktif akibat konflik, sehingga untuk mendukung perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis, atau dalam rangka memfasilitasi pengembangan dinamika masyarakat dari tahap negative peace menjadi positive peace untuk kemudian menuju ke arah sustainable peace, sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit berupa kebijakan pembangunan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik.

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi dan gambaran mengenai realitas sosial dan politik dalam proses pembangunan pada masyarakat, khususnya di desa Arma, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta memahami dan mendalami potensi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menjamin proses pembangunan yang damai dan berkelanjutan dalam kerangka mengimplementasikan sebuah sistem pembangunan partisipatif dan berbasis kekuatan lokal.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada metode kualitatif yang menunjuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, untuk memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan mereka, menangkap pengalaman-pengalaman mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari dan mengkaji pengalaman yang sama sekali belum kita ketahui (lihat misalnya Moleong 2006).

Lokasi penelitian adalah desa Arma yang terletak di Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya guna menjawab permasalahan sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam studi ini mewakili berbagai unsur dalam masyarakat yakni tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pendidik. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah, dianalisa dan diinterpretasi. Selain data primer, dikumpulkan pula sejumlah data sekunder khususnya yang terkait atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pembahasan

Desa Arma merupakan salah satu desa di pesisir timur Pulau Yamdena bagian utara. Secara administrasi desa ini berada di Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara

Barat. Jarak desa Arma dengan kota kecamatan adalah sekitar 15 km. Penduduk Arma pada tahun 2013 berjumlah 1910 jiwa, yang terdiri dari 984 laki-laki dan 926 perempuan. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai petani dengan sistem perladangan slash and burn (tebas dan bakar). Letaknya di pesisir membuat mereka juga melakukan aktivitas nelayan ketika keadaan laut tenang. Penduduk umumnya beragama Kristen Protestan.

Dalam kehidupan manusia, termasuk masyarakat desa Arma, konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan. Konflik lazim disebut pertentangan atau pertikaian, merupakan realitas yang kerap dijumpai dimanapun, entah pada aras antar orang-perorang, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok (Pariela, 2008). Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya mencapai tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lain. Konflik dapat terjadi, baik dalam lingkungan tempat tinggal kita, dimana konflik yang terjadi antar sesama masyarakat dalam satu lingkungan maupun dengan kelompok atau masyarakat dari luar lingkungan kita. Demikian halnya dengan sumber atau pemicu konflik, yang berkaitan dengan segala persoalan menyangkut kehidupan manusia. Konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Arma meliputi:

1. Peta Konflik Internal

a. konflik dalam keluarga/rumahtangga

Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, antara anggota keluarga (suami isteri atau anggota keluarga lain) sering bermuara pada masalah-masalah dalam rumah tangga antara suami-isteri atau kesalahpahaman antara anggota keluarga lain yang menyangkut masalah ekonomi dan sosial, misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan rumahtangga, istri pergi ke rumah orangtua dengan anak-anak tanpa pamit pada suami, suami sering "minum", dan kasus perselingkuhan. Perselisihan ini biasanya dalam bentuk pertengkaran atau adu mulut, terkadang sampai mengganggu tetangga lainnya karena volume suara yang dikeluarkan oleh anggota rumahtangga yang berselisih itu meninggi akibat emosi yang berlebihan. Namun perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga ini tidak berlangsung lama, karena esoknya mereka sudah terlihat rujuk kembali dan saling berkelakar, walaupun ada yang mengakibatkan retaknya hubungan suami-istri, dan ada kasus perselingkuhan yang dibawa sampai ke kantor desa dan polisi. Konflik di tingkat ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat desa Arma.

Konflik dalam keluarga juga terjadi karena masalah tanah. Tanah yang merupakan warisan keluarga dijual oleh salah satu keluarga atau anggota keluarga tanpa meminta ijin keluarga/anggota keluarga lain sebagai pemegang hak milik bersama. Konflik ini pernah terjadi dan berbentuk adu mulut dan menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan.

Konflik yang diakibatkan pengaruh politik, dimana dalam satu keluarga bapak dan anak menjadi pengikut calon kepala daerah yang berbeda (pada waktu pilkada). Ini menimbulkan konflik akibat fanatisme terhadap calon/partai yang didukung oleh masing-masing individu. Namun konflik ini tidak terlalu berdampak pada hubungan dalam keluarga karena terjadi hanya pada saat pilkada saja, dan setelah pilkada selesai biasanya akan mereda dan selesai untuk kembali ke suasana seperti semula.

b. konflik antar keluarga dan antar warga desa

Konflik antara keluarga biasanya disebabkan oleh terjadinya kesalahpahaman atau ketersinggungan yang dirasakan oleh satu keluarga karena perkataan atau perlakuan dari keluarga lain. Pertikaian antar tetangga juga sering berawal dari perselisihan di antara anak-anak, yang kemudian melibatkan orang tua (ibu-ibu) mereka. Perselisihan ini biasanya berbentuk adu mulut, tidak berlangsung lama dan tidak sering terjadi. Konflik di tingkat ini juga terjadi berawal dari para ibu yang berkumpul dan bergosip, yang akibatnya menimbulkan masalah dan pecahnya hubungan sosial di antara mereka atau dengan ibu-ibu lain yang digosipkan. Biasanya konflik ini juga berbentuk adu mulut. Konflik biasanya paling lama hanya sekitar 1 atau 2 hari. Konflik terjadi juga karena hasutan-hasutan dari orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian dalam masyarakat, walaupun demikian, konflik di tingkat ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat desa Arma.

Konflik yang terjadi antar warga desa diakibatkan oleh batas tanah (terutama lahan kebun). Konflik ini sering terjadi pada saat mendekati musim tanam (Agustus - November) yang biasanya didahului dengan membuka lahan dengan cara membakar. Semua warga merasa berhak membuka kebun di lahan milik desa, selain lahan milik mereka sendiri. Konflik sering terjadi pada lahan milik desa karena tidak ada pengaturan dari desa, sehingga pengelolaannya sering terjadi gesekan karena semua orang merasa berhak membuka lahan seluas-luasnya. Namun konflik ini biasanya hanya terjadi pada saat buka lahan, dan diselesaikan antar keluarga yang berkonflik. Konflik ini akan mereda setelah musim tanam, dimana semua orang sudah disibukkan dengan bercocok tanam di lahan yang telah diperolehnya.

c. Konflik antara warga dengan pemerintah desa

Konflik warga dengan pemerintah desa terjadi berkaitan dengan masuknya PT. Karya Jaya Berdikari yang memperoleh ijin pengelolaan hasil hutan (pemegang HPH). Konflik ini terjadi karena adanya pro kontra dalam masyarakat dimana ada yang menyetujui dan ada yang menolak kehadiran perusahaan pemegang HPH dalam desa, sehingga terbentuk dua kelompok dalam masyarakat. Selain itu juga pemerintah desa dianggap bertindak (mengambil keputusan) sendiri tanpa melakukan musyawarah dengan warga desa, sehingga masyarakat yang merasa haknya sebagai pemilik ulayat (hutan) merasa tidak diindahkan serta dilibatkan. Pemerintah desa juga dianggap tidak transparan dalam mengambil kebijakan menyangkut persetujuan dan perijinan terkait kehadiran perusahaan dalam desa untuk mengelola hasil hutan (kayu). Menurut informan, kebijakan yang ditempuh pemerintah desa dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam milik desa harus transparan dengan melibatkan masyarakat, karena masyarakat juga memiliki hak terhadap sumberdaya yang ada di desa. Selain itu konflik juga terjadi akibat kurang transparannya pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ada di desa.

d. Konflik antar tokoh masyarakat (elite)

Konflik yang terjadi antar tokoh masyarakat (elite) salah satunya juga diakibatkan oleh kehadiran perusahaan pengelola HPH dalam desa. Perpecahan dalam masyarakat akibat terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan keikutsertaannya terhadap tokoh masyarakat tertentu. Perpecahan yang terjadi pada elite desa diakibatkan ada tokoh masyarakat yang setuju dengan kehadiran perusahaan pengelola HPH dan ada tokoh masyarakat yang tidak setuju/menolak kehadiran perusahaan dalam desa.

Selain itu juga ada konflik yang terjadi dalam organisasi pemerintahan di desa, yakni antara aparat desa. Konflik ini terjadi akibat tidak ada kesepakatan dalam melaksanakan tugas. Sebahagian aparat pemerintah beranggapan keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah. Konflik antar elite desa terutama menyangkut program/proyek desa yang dikelola pemerintah desa. Konflik terjadi karena tidak terbukanya pemerintah desa terhadap proyek-proyek yang sedang dilaksanakan di desa. Konflik ini lebih berupa rasa tidak puas terhadap cara yang dipakai oleh pemerintah desa, ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan. Konflik yang terjadi dalam organisasi pemerintahan ini berdampak pada sikap masa bodoh dari aparat pemerintahan yang tidak dilibatkan, dan mereka juga tidak aktif dalam menjalankan tugasnya.

e. konflik di kalangan anak muda/kelompok anak muda

Konflik di kalangan anak muda didominasi akibat konsumsi minuman keras yang berlebihan yang berakhir dengan mabuk. Karena mabuk terjadi perdebatan dan adu mulut antar individu maupun kelompok anak muda yang berakhir dengan perkelahian fisik antar mereka yang berakibat luka-luka. Selain perkelahian dengan menggunakan tangan, kadang juga memakai kayu ataupun besi yang ada di sekitar lokasi perkelahian, walaupun penggunaan alat ini jarang terjadi. Biasanya konflik di kalangan anak muda ini tidak berlangsung lama, karena konflik tersebut lebih didasarkan pada emosi maupun pengaruh minuman keras. Bila emosi maupun pengaruh minuman keras telah berakhir, biasanya mereka berdamai lagi atau perselisihan dapat diatasi dan ini biasanya tidak berlangsung lama (2-4 hari). Perkelahian ini sering sekali terjadi, kebanyakan pada jumat dan sabtu malam. Akibat dari perkelahian tersebut adalah luka ringan, jarang ada yang sampai harus masuk rumah sakit. Namun ada juga yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, yaitu dengan memecahkan kaca rumah tetangga. Karena mabuk, mereka sering bikin ulah dengan warga masyarakat lainnya.

2. Peta Konflik Eksternal

a. Konflik dengan desa tetangga

Konflik dengan desa tetangga sering terjadi pada saat menjelang musim tanam yang didahului dengan pembukaan lahan baru untuk berkebun. Pembukaan lahan baru biasanya dilakukan dengan pembakaran lahan, terutama untuk lokasi kebun baru karena lahan kebun yang lama dianggap sudah kurang/tidak produktif. Masyarakat kemudian mencari lahan baru (pola peladangan berpindah masih dilakukan masyarakat Maluku Tenggara Barat). Pembukaan lahan baru (bakar lahan) yang biasa dilakukan antara bulan Agustus-November, cenderung mengakibatkan konflik, terutama untuk lahan yang berada di wilayah perbatasan antar desa. Semua masyarakat merasa mempunyai hak untuk mengusahakan lahan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Batas petuanan desa yang kurang jelas juga (batas petuanan cenderung menggunakan tanda alam) yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik warga antar desa yang berbatasan. Untuk itu pada saat musim buka lahan perlu tindakan antisipasi baik dari tokoh masyarakat, aparat keamanan (kepolisian sektor), pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan.

Konflik dengan desa tetangga (desa Watmuri) juga pernah terjadi terkait batas petuanan wilayah laut. Konflik ini sudah berlangsung sejak dulu, karena saling klaim terhadap batas wilayah petuanan dan juga akibat tidak jelasnya batas wilayah kepemilikan (petuanan) dari kedua desa. Persoalan ini harus ditindak lanjuti dan diselesaikan, mengingat sumberdaya laut selain merupakan sumber makanan bagi masyarakat, juga diambil untuk dijual karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi (teripang, lola). Permasalahan batas petuanan laut yang sudah ada sejak lama, sampai sekarang ini belum juga terselesaikan. Untuk itu pemerintah (kecamatan/kabupaten) perlu memediasi penyelesaiannya terutama yang menyangkut hak ulayat dari desa yang bersengketa. Penerapan hukum adat dengan melibatkan tokoh adat melalui penelusuran sejarah desa sangat penting untuk dapat menghindari serta menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama ini.

b. Konflik dengan orang/kelompok dari luar

Masuknya perusahaan PT. Karya Jaya Berdikari sebagai pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), di desa Arma, mengakibatkan adanya pro kontra dari masyarakat desa, karena ada yang menyetujui dan ada yang menentang. Adanya dua kubu yang bertentangan dalam pengelolaan hutan tersebut, dipicu juga oleh pihak pengelola (pengusaha) HPH yang turut serta dalam memprovokasi kelompok masyarakat agar mau memberikan hutan (petuanan desa) masuk dalam wilayah pengelolaan HPH perusahaan. Ini mengakibatkan terjadinya konflik antara warga yang menolak HPH dengan perusahaan yang berbuntut pada pembakaran basecamp milik PT. Karya Jaya Berdikari pada bulan Agustus 2012.

c. Konflik antar pemuda atau kelompok pemuda

Konflik antar pemuda kedua desa bertetangga (Arma dan Watmuri) pernah terjadi, akibat mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan. Konflik ini berujung dengan perkelahian antar pemuda. Perkelahian antar pemuda kedua desa dapat diatasi dan didamaikan dengan bertemunya pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dipanggilnya orang tua/keluarga pemuda dan para pemuda yang terlibat dalam insiden tersebut untuk diberikan nasihat-nasihat agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Melalui dialog dibuat perjanjian di antara mereka yang berkonflik untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka. Menurut informan, hasil dari kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dituangkan dalam perjanjian tertulis yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkonflik. Bila ada yang melanggar kesepakatan maka mereka akan dilaporkan oleh pemerintah desa ke polisi untuk dimasukkan ke dalam penjara (hukum kurungan). Dalam pertemuan itu juga dilibatkan pihak kepolisian. Inisiatif yang diambil

pemerintah desa dimaksudkan agar persoalan tersebut jangan berlama-lama yang akhirnya bisa melebar, sehingga perlu penanganan secepatnya. Inisiatif yang diambil tersebut mendapat reaksi/respon positif dari masyarakat, meskipun ada juga yang keberatan (keluarga korban) yang merasa dirugikan, namun lebih banyak masyarakat yang menginginkan konflik tersebut segera diselesaikan. Setelah dilakukan pendekatan baik dari pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, akhirnya semua pihak menyetujuinya karena ini merupakan hal yang positif bagi ketenangan kehidupan masyarakat desa. Proses penyelesaian konflik tersebut juga tidak memerlukan waktu yang lama (2-4 hari).

3. Peta Konflik Latent

Konflik selalu melekat dalam kehidupan manusia, dan berpotensi untuk terjadi kapan saja. Potensi konflik dalam kehidupan masyarakat desa Arma, terutama dengan desa tetangga berkaitan dengan batas petuanan wilayah laut. Sumberdaya laut sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang kemudian berkembang dengan tingginya nilai ekonomis sumberdaya laut yang ada (teripang, lola), menjadikan konflik dapat terjadi sewaktu-waktu terutama pada saat panen sumberdaya laut dimaksud. Selain itu juga sejak masuknya perusahaan yang mengusahakan hasil hutan (HPH) yang menciptakan kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik. Saling curiga antar individu atau kelompok yang berseberangan masih ada akibat kehadiran perusahaan tersebut. Demikian halnya dengan pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar desa seperti pihak luar yang memprovokasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat maupun desa.

Dalam desa Arma ketidak harmonisan antar pemerintah desa dengan beberapa tokoh masyarakat juga merupakan potensi konflik yang terselubung. Adanya saling curiga mengenai program atau proyek yang dilaksanakan di desa . Proyek atau program tanpa melibatkan masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan penggelapan dana.

Konflik yang terjadi antar aparat pemerintah desa lebih terfokus pada program atau proyek desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan konflik ini didasarkan pada perbedaan prinsip yang tidak berhasil disatukan. Kecurigaan antar aparat pemerintah desa juga terjadi, akibat ada yang tidak setuju dengan proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa karena tidak melibatkan semua aparat pemerintah desa maupun masyarakat secara keseluruhan.

Ketidaktransparannya pemerintah desa kepada masyarakat menimbulkan prasangka-prasangka tidak baik kepada pemerintahan desa, bahkan menimbulkan perasaan seperti dianaktirikan. Untuk mencegah konflik, seharusnya semua persoalan harus dan perlu dikomunikasikan.

4. Hasil Capaian dan Pemeliharaan Kesepakatan Perdamaian

Penyelesaian konflik berupa kesepakatan perdamaian yang terjadi di desa Arma biasanya berupa pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perselisihan yang terjadi (terutama konflik dalam rumah tangga dan atau antar rumah tangga) dengan perjanjian/kesepakatan secara lisan melalui dialog pemuka agama (pendeta) dengan pelaku konflik untuk mencari solusi yang terbaik dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai, yang intinya tentang pentingnya hidup rukun, serta pandangan-pandangan yang menyejukkan dan positif untuk menyelesaikan konflik. Seorang informan mengatakan bahwa penyelesaian secara tidak tertulis ini (by oral) menunjukkan ada

komitmen moral, bukan komitmen teks. Biasanya juga dilakukan dengan pendekatan agama melalui pelayanan pastoral oleh tokoh agama. Dasar pemikiran bahwa semua manusia memiliki dasar keimanan, sehingga kalau ditangani oleh pendeta maka persoalannya akan cepat selesai. Memang bila ada konflik dalam rumah tangga maupun antar tetangga, yang paling baik adalah bila pendeta atau orangtua/ yang dituakan datang, karena masyarakat masih memiliki perasaan "malu hati" terhadap orang yang dihormati/dituakan. Namun terkadang persoalan nampak selesai pada waktu itu juga, tetapi dalam hati masih belum menerima. Biasanya antara yang berkonflik akan saling diam, tidak bertegur sapa dalam kurun waktu tertentu, namun dengan berjalannya waktu, beberapa minggu masalah tersebut akan mencair dengan sendirinya.

Penyelesaian konflik/perkelahian antar anak muda selain membuat pernyataan secara lisan biasanya juga dengan pendekatan dari tokoh agama dengan dinasehati. Pendekatan pastoral/agama ini biasanya lebih ampuh dari pernyataan/perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, karena masyarakat cenderung lebih takut dan taat terhadap hukum Tuhan. Biasanya kesepakatan lisan ini direspons oleh masing-masing pihak dengan dukungan dan penerimaan sepenuhnya, dan dipelihara oleh mereka. Cara memelihara kesepakatan adalah dengan saling pengertian di antara mereka.

Konflik/perkelahian antar anak muda, bila mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri dan sudah mengganggu orang lain/masyarakat, maka tokoh-tokoh masyarakat/pemerintah desa akan menengahinya dan mendamaikan. Berkaitan dengan perkelahian pemuda antar desa yang pernah terjadi diselesaikan dengan bertemunya pemerintah desa, tokoh agama dan dipanggilnya orang tua/keluarga pemuda dan para pemuda yang terlibat dalam insiden tersebut untuk diberikan nasihat-nasihat agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Penyelesaian konflik antar anak muda ini juga dilakukan dengan perjanjian tertulis dengan konsekuensi/sanksi bila terulang lagi maka mereka yang terlibat akan dilaporkan ke kepolisian untuk ditahan.

Konflik/perkelahian antar anak muda juga ada yang diselesaikan di polisi (Polsek) dengan membuat pernyataan di depan petugas polisi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apabila mereka masih melakukannya juga maka akan dikenakan hukuman badan berupa kurungan di tahanan polsek. Biasanya bila sudah sampai ke pihak yang berwajib (polsek) maka kesepakatan perdamaian biasanya dalam bentuk tertulis.

Salah satu cara menciptakan perdamaian dan menghindari atau meminimalisir konflik antar anak muda adalah dengan melarang atau meniadakan minuman keras dalam lingkungan desa karena seperti diketahui minuman keras sering merupakan pemicu konflik.

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan perusahaan pemegang HPH di desa telah dilakukan dengan dimediasi oleh pemerintah kabupaten dan aparat keamanan (kepolisian). Namun penyelesaian yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai titik temu atau kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat merasa kebijakan pemerintah kabupaten tidak memihak pada rakyat, masyarakat merasa memiliki sumberdaya tetapi tidak ikut menikmati sumberdaya itu. Berbagai upaya terus dilaksanakan terutama untuk mencegah terjadinya konflik yang akan berdampak pada perpecahan dalam masyarakat. Peran tokoh agama (pendeta) melalui pelayanan rohani diberikan, baik di gereja maupun tatap muka yang sering dilakukan untuk memberikan pengarahan-pengarahan dan

pemahaman kepada masyarakat untuk tidak berkonflik dan memelihara kedamaian. Melalui cara ini, masyarakat dibina mental dan moral agar dapat melaksanakan hukum atau ajaran agama, yang intinya adalah saling mengasihi terhadap sesama.

Konflik yang terjadi antar desa Arma dan Watmuri berkaitan dengan sumberdaya alam laut sudah terjadi sejak dulu. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pertemuan antara pemerintah kedua desa dengan melibatkan tokoh adat maupun pemerintah kabupaten namun belum sepenuhnya memperoleh kesepakatan dan kesepakatan menyangkut permasalahan tersebut. Konflik batas petuanan menyangkut hak ulayat merupakan masalah yang sangat sensitif, karena masing-masing desa merasa berhak atas kepemilikan sumberdaya tersebut. Pendekatan yang dilakukan selama ini lebih sering dilakukan oleh tokoh agama (pendeta) saat ibadah di gereja maupun kunjungan-kunjungan pastoral yang sering dilakukan yang memberikan pengertian kepada umatnya tentang pentingnya hidup rukun dan damai. Pendekatan dengan pelayanan rohani cukup efektif dalam meredam serta meminimalisir konflik, karena masyarakat lebih percaya pada tokoh agama dibandingkan pemerintah.

5. Upaya-upaya pencegahan konflik

Pemerintah desa hendaknya harus transparan dalam melaksanakan program/proyek pembangunan dengan melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Sebagai pelaksana kebijakan yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa harus menyadari bahwa masyarakat desa juga berhak terhadap pengelolaan sumberdaya di desa. Keterbukaan pemerintah desa terhadap berbagai program yang berlangsung di desa sangat penting untuk menghindari terjadinya saling curiga serta menghilangkan rasa tidak percaya dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi perlu dikomunikasikan, dan yang harus melakukan inisiatif untuk mencegah adalah pemerintah desa.

Pemerintah desa harus memiliki sikap bijaksana dan netral, tidak memihak kepada kelompok tertentu karena selain perannya sebagai pemimpin di desa, ia juga harus memosisikan dirinya sebagai pemersatu bagi seluruh masyarakat, karena itu setiap ada perselisihan antar warga yang terjadi di desa ia harus menjadi penengah untuk menyelesaikannya. Demikian juga menyangkut persoalan desa, aparat pemerintah desa hendaknya melibatkan berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi. Tindakan ini penting untuk menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan antar pemerintah desa dan warganya.

Peranan adat lokal harus dilaksanakan dan ditingkatkan penggunaannya, karena bagaimanapun sebagai kesatuan masyarakat adat masih mentaati aturan-aturan adat yang telah dilaksanakan sejak dulu.

Peranan media agama melalui pelayanan rohani oleh tokoh agama pada pemeluknya baik melalui ceramah di tempat ibadah maupun dengan cara kunjungan pastoral ke rumah-rumah masyarakat harus sering dilakukan karena peranan agama terbukti sangat berpengaruh dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Arma, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Konflik merupakan realitas objektif yang ditemukan pada berbagai kehidupan, baik di dalam maupun antar komunitas, dengan para pelaku, sumber-sumber dan dampak yang berbeda-beda.
- b. Intensitas konflik di dalam komunitas dijumpai lebih tinggi dibandingkan dengan antar komunitas. Namun dari aspek dampaknya, seringkali konflik antar komunitas memiliki dampak yang lebih besar.
- c. Peran para tokoh masyarakat dan tokoh adat memiliki arti penting untuk menyelesaikan konflik di dalam dan antar komunitas.
- d. Sejumlah katup pengaman (safety valve) terutama yang berbasis institusi agama, masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan masalah konflik di tingkat desa.
- e. Dalam menangani konflik di desa, pendekatan yang umum digunakan masih bersifat resolutif (ada masalah, baru ditangani). Jarang ditemukan pendekatan manajemen konflik untuk mencegah konflik terjadi secara terbuka, dan kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya lainnya guna memelihara kondisi damai yang ada (manajemen damai).

2. Saran

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisa/interpretasi yang dilakukan terhadap realitas kehidupan masyarakat di desa Arma, maka beberapa rekomendasi sebagai saran tindak yang bisa dikemukakan adalah:

- a. Pemerintah harus serius dan lebih berperan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini terjadi untuk menghindari terjadinya konflik, termasuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik demi terciptanya perdamaian berkelanjutan.
- b. Perlu dilaksanakan suatu pendidikan damai (peace education) bagi komponen-komponen strategis di tingkat desa secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola konflik (conflict management). Dengan pendidikan damai yang dilakukan melalui pelatihan, diharapkan baik pengetahuan maupun kemampuan para pemimpin formal dan informal dapat ditingkatkan, sehingga pada gilirannya berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan inter dan antar komunitas.
- c. Pasca pelatihan, diperlukan suatu proses pendampingan bagi masyarakat di desa dalam kurun waktu atau periode tertentu, sehingga secara bertahap warga masyarakat mampu mengembangkan kemampuan ketahanan diri yang terinstitusionalisasi di dalam struktur masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Pustaka Eureka, Surabaya

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, Resort Maluku Tenggara Barat. 2014. Data Konflik Sosial Polres Maluku Tenggara Barat Tahun 2010-2014, Saumlaki
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, F, Pradjarto Dirdjosanjoto, dan Nico L.Kana (ed). 2004. Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pariela, D. Tonny. 2008. Damai di Tengah Konflik Maluku, Preserved Social Capital sebagai Survival Strategy. Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Press, Salatiga.
- van Ufford, Philip Quarles dan Ananta Kumar Giri (ed). 2004. Kritik Moral Pembangunan. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.